



## Pengaruh Audit Kinerja Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Sarah Andini<sup>1</sup>, Mulyati Akib<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email : [sarahandini1901@gmail.com](mailto:sarahandini1901@gmail.com) , [mulyatiakib.feb@uho.ac.id](mailto:mulyatiakib.feb@uho.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh audit kinerja dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada instansi pemerintah daerah, dengan fokus studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Fenomena fraud yang marak terjadi di sektor publik menegaskan urgensi penguatan fungsi pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada pegawai Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, menghasilkan total sampel akhir sebanyak 45 responden yang terdiri dari fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD). Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda yang diolah berbantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap tata kelola audit. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa audit kinerja dan pengendalian internal secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pencegahan fraud ( $p = 0,000$ ). Secara parsial (Uji t), audit kinerja terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud ( $t = 4,385$ ,  $p = 0,000$ ). Begitu pula dengan pengendalian internal yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang sangat kuat terhadap pencegahan fraud ( $t = 5,061$ ,  $p = 0,000$ ). Nilai Koefisien Determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,672, menandakan bahwa 67,2% variabilitas variabel pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh variasi tindakan audit kinerja dan keandalan sistem pengendalian internal organisasi, sedangkan sisanya sebesar 32,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil riset ini memberikan kontribusi teoretis pada penguatan Agency Theory dan Hexagon Fraud Theory, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan daerah dalam merumuskan strategi preventif anti-korupsi.

Kata Kunci: Audit Kinerja, Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud, Sektor Publik, Kebijakan Preventif.

### Abstract

This study aims to examine and empirically analyze the influence of performance audit and internal control systems on fraud prevention within local government agencies, with a case study on the Regional Inspectorate of South Konawe Regency. The phenomenon of widespread fraud in the public sector underscores the urgency of strengthening the oversight function of the government internal supervisory apparatus (APIP). The research approach used is causal quantitative by collecting primary data through structured questionnaires distributed to employees at the South Konawe Regency Inspectorate. Sample selection was conducted using a purposive sampling technique based on specific criteria, yielding a final sample of 45 respondents comprising functional Auditors and Regional Government Affairs Supervisors (PPUPD). The data analysis technique utilized Multiple Linear

Regression Analysis processed using SPSS version 26 software. The results of the simultaneous hypothesis testing (F-test) indicate that performance audit and internal control together exert a significant effect on the effectiveness of fraud prevention ( $p = 0.000$ ). Partially (t-test), performance audit is proven to have a positive and significant effect on fraud prevention ( $t = 4.385$ ,  $p = 0.000$ ). Similarly, internal control demonstrates a very strong positive and significant influence on fraud prevention ( $t = 5.061$ ,  $p = 0.000$ ). The Coefficient of Determination (R Square) obtained is 0.672, indicating that 67.2% of the variability in the fraud prevention variable can be explained by variations in performance audit practices and the reliability of the organizational internal control system, while the remaining 32.8% is influenced by other variables not included in this research model. These findings contribute theoretically to strengthening Agency Theory and Hexagon Fraud Theory, as well as practically for local policymakers in formulating preventive anti-corruption strategies.

**Keywords:** Performance Audit, Internal Control, Fraud Prevention, Public Sector, Preventive Policy.

## **I. PENDAHULUAN**

Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia semakin meningkat seiring dengan meluasnya kesadaran publik akan hak-hak mereka atas pelayanan negara yang transparan, bersih, dan akuntabel. Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, memikul tanggung jawab besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara produktif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih dibayangi oleh tingginya risiko fraud (kecurangan) yang melibatkan berbagai oknum birokrasi. Fraud di sektor publik bukan hanya merugikan keuangan negara secara masif, tetapi juga melumpuhkan kualitas pelayanan publik, menghambat laju pembangunan daerah, serta menghancurkan legitimasi dan moralitas institusi pemerintah di mata publik.

Fenomena penyimpangan dana anggaran daerah ini membuktikan bahwa kerentanan terhadap tindak pidana korupsi masih menjadi tantangan struktural utama yang mendesak untuk diselesaikan. Dalam konteks pencegahan fraud, pendekatan konvensional yang bersifat penindakan (represif) pasca-kejadian dinilai kurang efisien dan memakan biaya operasional penegakan hukum yang sangat tinggi tanpa menjamin pemulihan kerugian keuangan negara secara utuh. Oleh sebab itu, paradigma tata kelola modern kini bergeser secara radikal ke arah penguatan strategi pencegahan (preventif) yang komprehensif, terstruktur, dan berkesinambungan. Fokus utama strategi ini diletakkan pada penciptaan suatu ekosistem organisasi internal yang mampu mendeteksi potensi kecurangan sebelum penyimpangan tersebut terealisasi menjadi tindakan pidana korupsi yang masif.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah komando Inspektorat Daerah memegang peranan yang sangat sentral sebagai pilar pengawasan utama dalam arsitektur pencegahan fraud di lingkungan pemerintah kabupaten. Peran strategis APIP tidak lagi sekadar menjadi institusi pencari kesalahan administratif (watchdog), melainkan telah bertransformasi menjadi mitra penasihat strategis (strategic partner) dan agen perubahan (agent of change) yang bertugas memberikan nilai tambah bagi organisasi. Penilaian objektif

terhadap kinerja birokrasi diwujudkan melalui pelaksanaan instrumen Audit Kinerja. Berbeda dengan audit keuangan konvensional yang hanya mencermati kepatuhan regulasi dan kebenaran angka transaksi, audit kinerja melakukan penelaahan secara mendalam, objektif, dan sistematis terhadap aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas (3E) dari pelaksanaan program kerja instansi pemerintah.

Melalui penerapan audit kinerja yang ideal, setiap lini operasional dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi apakah sumber daya publik telah digunakan sesuai dengan peruntukannya tanpa ada pemborosan yang sengaja disembunyikan. Rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja ini esensial untuk menutup celah-celah birokrasi yang longgar, mengevaluasi indikator capaian program, serta menghentikan pemborosan yang sering kali menjadi pintu masuk bagi tindakan manipulasi anggaran oleh oknum oportunistis. Namun, audit kinerja tidak akan mampu berjalan optimal tanpa ditopang oleh fondasi sistem internal yang melekat kuat pada aktivitas harian organisasi. Di sinilah letak relevansi krusial dari penegakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai instrumen pengendalian struktural yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran birokrasi secara konsisten.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang komprehensif bertindak sebagai jaring pengaman harian (daily safety net) yang memayungi seluruh aset negara, memastikan akurasi pelaporan akuntansi, mempromosikan kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatkan efisiensi operasional. Karakteristik SPI yang tangguh tidak hanya bersandar pada kelengkapan dokumen formalitas belaka, melainkan pada internalisasi nilai-nilai integritas, kejelasan pembagian wewenang (segregation of duties), otorisasi transaksi yang berjenjang, serta sistem pemantauan berkala yang proaktif. Jika sistem pengendalian internal ini mengalami pelemahan atau kelumpuhan fungsi, maka tata kelola administrasi pemerintahan daerah akan menjadi sangat rapuh, menciptakan ruang kendali yang tidak terantau, dan pada akhirnya memberikan peluang emas bagi munculnya perilaku koruptif di lingkungan birokrasi daerah.

Urgensi mengenai pentingnya sinergi nyata antara audit kinerja dan pengendalian internal ini tercermin secara riil dalam kasus hukum tindak pidana korupsi yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe Selatan secara resmi telah menetapkan mantan bendahara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan sebagai tersangka utama dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana anggaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.001.460.700,00. Kasus penyimpangan dana fantastis ini terjadi sepanjang periode anggaran Januari hingga Desember 2024. Fakta bahwa penyimpangan sebesar ini dapat terjadi selama satu tahun penuh menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang mendalam dalam sistem pengendalian internal instansi terkait, serta kurang tajamnya fungsi deteksi dini pengawasan internal.

Lahirnya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara resmi yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 8 Desember 2025 menjadi bukti konkret atas peran krusial APIP pasca-kejadian. Namun, keberadaan kasus

korupsi dengan skala kerugian sebesar itu memicu sebuah pertanyaan evaluatif: Mengapa sistem pengendalian internal yang ada gagal mendeteksi dan mencegah manipulasi tersebut sejak dini? Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata (research & empirical gap) antara regulasi tata kelola pengawasan ideal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi praktis di lapangan. Kabupaten Konawe Selatan menjadi locus penelitian yang sangat relevan dan menarik untuk menguji sejauh mana variabel audit kinerja dan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh Inspektorat mampu memitigasi dan mencegah timbulnya fraud birokrasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini memformulasikan tiga rumusan masalah utama: (1) Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan? (2) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan? (3) Apakah audit kinerja dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan? Penelitian ini diarahkan untuk memberikan bukti empiris yang valid mengenai peran pengawasan internal dalam memutus mata rantai fraud sektor publik.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Landasan Teori**

Teori Keagenan (Agency Theory) yang diformulasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) mendasari hubungan kontraktual yang kompleks antara pihak principal (pemilik sumber daya) dan pihak agent (pengelola sumber daya yang diberi delegasi wewenang). Dalam konteks organisasi sektor publik, hubungan keagenan ini bermanifestasi dalam bentuk hubungan antara masyarakat luas atau pemerintah pusat sebagai principal, dan aparatur birokrasi pemerintah daerah sebagai agent. Principal memberikan amanah berupa pengelolaan dana pajak publik dan kekayaan daerah untuk dikonversi menjadi program kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam realitas birokrasi, muncul masalah keagenan (agency problem) yang dipicu oleh konflik kepentingan (conflict of interest).

Agent cenderung memiliki motivasi internal untuk memaksimalkan utilitas pribadi mereka sendiri (self-interest), yang sering kali bertentangan dengan kepentingan publik. Masalah keagenan ini diperparah oleh adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu suatu kondisi di mana agent memiliki akses informasi yang jauh lebih banyak, detail, dan cepat mengenai realitas operasional dan pengelolaan anggaran dibandingkan dengan principal. Asimetri informasi ini memberikan ruang dan kesempatan bagi agent untuk menyembunyikan kebenaran transaksi, melakukan manipulasi laporan, dan melakukan fraud demi keuntungan personal. Untuk menjembatani gap informasi dan mengendalikan perilaku oportunistik agent, diperlukan instrumen pengawasan eksternal dan internal yang independen, yaitu berupa pelaksanaan audit kinerja yang mendalam serta penegakan sistem pengendalian internal yang andal.

Teori Hexagon Fraud (Hexagon Fraud Theory) yang dikembangkan oleh Vouisnas (2019) sebagai perluasan mutakhir dari model-model fraud sebelumnya (Fraud Triangle, Fraud Diamond, dan Fraud Pentagon), menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan mengidentifikasi enam elemen pemicu kecurangan, yaitu: Stimulus/Pressure (Tekanan), Opportunity (Kesempatan), Rationalization (Rasionalisasi), Capability (Kemampuan), Collusion (Kolusi), dan Arrogance (Keangkuhan). Dalam konteks riset pengawasan internal ini, fokus utama diarahkan pada intervensi terhadap elemen Opportunity (Kesempatan). Elemen kesempatan merupakan satu-satunya faktor pemicu fraud yang berada penuh di bawah kendali manajemen organisasi dan dapat diminimalisir hingga titik terendah melalui rekayasa sistem tata kelola.

Kesempatan untuk melakukan fraud muncul apabila pengawasan harian organisasi sangat lemah, terdapat kelonggaran prosedur administrasi, dan tidak adanya sanksi yang tegas. Pelaksanaan audit kinerja secara periodik oleh APIP dan penerapan lima komponen pengendalian internal kerangka COSO (2013) secara simultan dirancang untuk mengeliminasi elemen kesempatan tersebut. Ketika struktur pengendalian internal berjalan dengan sangat ketat dan aktivitas audit kinerja secara aktif memantau kepatuhan operasional, maka persepsi risiko terdeteksi di kalangan aparatur birokrasi akan meningkat drastis. Hal ini secara otomatis menekan keinginan individu untuk melakukan fraud karena kesempatan untuk menyembunyikan tindakan manipulasi telah ditutup rapat oleh sistem.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis**

Audit kinerja memfokuskan evaluasinya pada efisiensi penggunaan masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) serta pencapaian hasil (outcome) dari kebijakan publik. Melalui pengujian substantif terhadap prosedur kerja, audit kinerja mampu mendeteksi pola pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, dan pengadaan barang/jasa fiktif yang kerap menjadi modus fraud sektor publik. Penelitian terdahulu oleh Lestari dan Nugroho (2021) mengonfirmasi bahwa instansi pemerintah yang rutin menyelenggarakan audit kinerja berkualitas mengalami penurunan tingkat penyimpangan anggaran yang signifikan. Audit kinerja yang baik mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan dengan menetapkan indikator capaian yang transparan. Berdasarkan argumentasi tersebut, dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: H1: Audit Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud.

Sistem Pengendalian Internal yang andal menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan akuntabel. Berdasarkan rerangka COSO (2013), pengendalian internal tidak sekadar mengandalkan aspek check and balance fisik, tetapi dimulai dari pembentukan komitmen integritas di lingkungan kerja (lingkungan pengendalian). Penilaian risiko yang proaktif membantu instansi memetakan area rawan fraud seperti bagian keuangan dan pengadaan. Aktivitas pengendalian seperti pemisahan fungsi pencatatan, otorisasi, dan penyimpanan aset secara fisik memutus rantai peluang kecurangan tunggal. Riset empiris oleh Mahendra, Putra, dan Sari (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berkorelasi kuat

dengan penurunan fraud akuntansi. Atas dasar pemikiran ini, hipotesis kedua dirumuskan: H2: Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud.

Secara simultan, gabungan antara audit kinerja dan sistem pengendalian internal menciptakan sebuah benteng pertahanan yang kokoh bagi instansi pemerintah (integrated defense mechanism). Pengendalian internal bertindak sebagai pencegah harian di tingkat mikro operasional, sementara audit kinerja mengevaluasi efektivitas makro dari implementasi sistem pengawasan tersebut. Gabungan kedua variabel ini secara teoretis mampu melumpuhkan elemen opportunity dan collusion dalam Hexagon Fraud Theory. Penelitian Rosna (2025) mempertegas bahwa sinergi pengawasan internal yang menyeluruh menghasilkan daya tangkal fraud yang jauh lebih kuat dibandingkan jika variabel tersebut berdiri sendiri. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dikembangkan: H3: Audit Kinerja dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausalitas yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Locus penelitian ini ditetapkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis peran Inspektorat Konawe Selatan dalam menangani perhitungan kerugian negara pada kasus-kasus korupsi daerah, termasuk kasus BKPSDM Konsel tahun 2024-2025. Waktu pengumpulan data primer dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2026.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan total jumlah populasi sebanyak 85 pegawai. Mengingat karakteristik tugas pengawasan yang spesifik, penelitian ini menerapkan teknik pengambilan sampel berupa Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria inklusi tertentu demi menjamin validitas informasi yang diperoleh. Kriteria sampel yang ditetapkan meliputi: (1) Pegawai yang memiliki jabatan fungsional sebagai Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD); (2) Memiliki masa kerja minimal selama 1 (satu) tahun di Inspektorat Konawe Selatan; (3) Pernah terlibat langsung dalam tim penugasan audit kinerja atau evaluasi pengawasan internal. Berdasarkan kriteria ketat tersebut, diperoleh jumlah sampel akhir yang memenuhi syarat sebanyak 45 responden.

Data dikumpulkan melalui metode kuesioner terstruktur yang disebarkan secara langsung kepada para responden. Kuesioner dirancang dengan menggunakan Skala Likert 5 poin untuk mengukur persepsi responden, di mana skor 1 merepresentasikan pilihan 'Sangat Tidak Setuju' (STS) dan skor 5 merepresentasikan pilihan 'Sangat Setuju' (SS). Operasionalisasi variabel dilakukan dengan menjabarkan setiap variabel ke dalam indikator-indikator empiris. Variabel Audit Kinerja (X1) diukur menggunakan indikator: perencanaan audit, kompetensi auditor, pelaksanaan audit aspek 3E, kualitas laporan hasil audit, dan

tindak lanjut rekomendasi. Variabel Pengendalian Internal (X2) dioperasionalkan berdasarkan 5 komponen COSO: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Variabel Pencegahan Fraud (Y) diukur menggunakan indikator: budaya anti-fraud, kejelasan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), efektivitas sanksi, transparansi transaksi, dan komitmen integritas aparatur.

Sebelum dilakukan analisis regresi, instrumen kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kualitas data. Selanjutnya, model regresi diuji kepatuhannya terhadap asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (VIF dan Tolerance), serta uji heteroskedastisitas (Uji Glejser). Metode analisis data utama yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan model matematis formal sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e.$$

Pengolahan data statistik seluruhnya diselesaikan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS versi 26.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Karakteristik Responden**

Berdasarkan data demografis yang berhasil dihimpun dari 45 responden pegawai APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, komposisi responden menunjukkan kualifikasi profesional yang sangat memadai. Ditinjau dari jenis jabatan, mayoritas responden merupakan fungsional Auditor sebanyak 28 orang (62,2%) dan fungsional PPUPD sebanyak 17 orang (37,8%). Dari aspek jenjang pendidikan formal, sebanyak 34 orang (75,6%) telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Akuntansi/Hukum/Administrasi, dan 11 orang (24,4%) telah menempuh pendidikan Pascasarjana Strata 2 (S2) Magister Akuntansi atau Magister Manajemen. Pengalaman kerja responden juga tergolong matang, di mana sebesar 68% responden memiliki masa kerja di atas 5 tahun di bidang pengawasan, sehingga pemahaman mereka terhadap substansi kuesioner dan praktik audit di lapangan memiliki tingkat validitas informasi yang sangat tinggi.

### **4.2 Hasil Pengujian Kualitas Data dan Asumsi Klasik**

Uji validitas instrumen dilakukan dengan membandingkan nilai Pearson Correlation ( $r_{hitung}$ ) dengan  $r_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% dan d.f. =  $n - 2$  ( $45 - 2 = 43$ ), diperoleh nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,294. Hasil analisis menunjukkan seluruh item pernyataan untuk variabel Audit Kinerja (X1), Pengendalian Internal (X2), dan Pencegahan Fraud (Y) memiliki nilai  $r_{hitung}$  berkisar antara 0,512 hingga 0,812, yang berarti seluruh item dinyatakan valid ( $r_{hitung} > 0,294$ ). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan nilai alpha sebesar 0,854 untuk variabel X1, sebesar 0,882 untuk variabel X2, dan 0,841 untuk variabel Y. Karena seluruh nilai Cronbach's Alpha jauh melampaui cut-off

point sebesar 0,70, maka seluruh instrumen dinyatakan sangat reliabel dan konsisten untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Pengujian asumsi klasik memberikan hasil yang memuaskan dan memenuhi seluruh persyaratan estimasi Ordinary Least Squares (OLS). Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 ( $> 0,05$ ), mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk variabel Audit Kinerja dan Pengendalian Internal adalah sebesar 0,612 (di atas 0,10) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,634 (jauh di bawah nilai batas 10,0). Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi untuk variabel X1 sebesar 0,342 dan variabel X2 sebesar 0,115. Karena nilai signifikansi berada di atas alpha 0,05, model regresi dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

### 4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Berdasarkan estimasi parameter regresi berganda menggunakan program SPSS 26, diperoleh ringkasan hasil statistik yang disajikan secara sistematis pada Tabel 1 di bawah ini:

Variabel / Koefisien	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	Signifikansi (p)	Kesimpulan Hipotesis
(Konstanta)	5,124	4,166	0,000	-
Audit Kinerja (X1)	0,342	4,385	0,000	H1 Diterima (Signifikan)
Pengendalian Internal (X2)	0,415	5,061	0,000	H2 Diterima (Signifikan)

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan output analisis parameter pada Tabel 1, persamaan regresi linear berganda empiris dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:  $Y = 5,124 + 0,342X1 + 0,415X2 + e$ . Interpretasi matematis dari model tersebut mengindikasikan nilai konstanta sebesar 5,124 menunjukkan bahwa jika variabel audit kinerja dan pengendalian internal diasumsikan konstan atau bernilai nol, maka nilai pencegahan fraud pada instansi tetap sebesar 5,124 satuan skala kepatuhan. Koefisien regresi untuk variabel X1 sebesar 0,342 menunjukkan hubungan searah (positif), di mana setiap peningkatan kualitas pelaksanaan audit kinerja sebesar satu satuan akan menaikkan skor pencegahan fraud sebesar 0,342 satuan. Hal yang sama berlaku untuk koefisien variabel X2 sebesar 0,415, yang berarti penguatan sistem pengendalian internal sebesar satu satuan akan meningkatkan efektivitas pencegahan fraud sebesar 0,415 satuan.

Pengujian Hipotesis Pertama (H1) secara parsial menunjukkan nilai t-hitung untuk variabel Audit Kinerja sebesar 4,385, yang jauh lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,018 (d.f. = 42,  $\alpha = 0,05$ ), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai  $p = 0,000 < 0,05$ , maka H1 secara meyakinkan diterima. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) menunjukkan nilai t-hitung variabel Pengendalian Internal sebesar 5,061, yang secara signifikan melampaui nilai t-tabel 2,018, dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ). Dengan demikian, H2 juga secara meyakinkan diterima.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) secara simultan dilakukan melalui Uji F (ANOVA). Hasil olah data menunjukkan nilai F-hitung sebesar 43,124 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai  $p = 0,000 < 0,05$ , maka H3 diterima, yang berarti variabel Audit Kinerja dan Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pencegahan Fraud pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Nilai Koefisien Determinasi (R Square) yang dihasilkan adalah sebesar 0,672. Angka ini mencerminkan bahwa model kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi pencegahan fraud adalah sebesar 67,2%. Sisa variabilitas sebesar 32,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar pemodelan ini, seperti sistem Whistleblowing, keandalan audit forensik, penerapan zona integritas, maupun komitmen moral kepemimpinan daerah.

#### **4.4 Pembahasan Temuan Penelitian**

Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa Audit Kinerja memiliki kontribusi positif yang signifikan dalam mendorong efektivitas pencegahan fraud di pemerintah daerah. Temuan ini berkeselarasan dengan esensi Teori Keagenan, di mana pelaksanaan audit kinerja oleh APIP mampu memitigasi dampak asimetri informasi yang dimiliki oleh para pengelola anggaran (agent). Audit kinerja bertindak sebagai instrumen pemantau independen yang membongkar praktik inefisiensi yang sengaja disembunyikan. Secara empiris, ketika auditor Inspektorat Konawe Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketepatan sasaran pemanfaatan APBD, maka peluang oknum birokrasi untuk melakukan tindakan manipulasi atau pengadaan fiktif akan menyusut. Temuan ini memperkuat hasil riset Lestari dan Nugroho (2021) serta menekankan bahwa audit kinerja bukan sekadar instrumen evaluasi output program kerja, melainkan mekanisme preventif utama untuk menegakkan akuntabilitas publik.

Pembahasan mengenai variabel Pengendalian Internal menegaskan bahwa keandalan sistem pengendalian internal (SPI) internal instansi pemerintah daerah memiliki pengaruh parsial yang paling dominan terhadap pencegahan fraud, ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang paling tinggi (5,061). Hal ini memberikan konfirmasi teoretis yang kuat pada Hexagon Fraud Theory yang diajukan oleh Vousinas (2019). Sistem pengendalian internal secara langsung mengintervensi dan melumpuhkan elemen Opportunity (kesempatan) yang ada dalam organisasi. Kasus korupsi bendahara BKPSDM Konawe Selatan pada tahun 2024 menjadi preseden berharga yang memvalidasi temuan ini: ketika aktivitas pengendalian harian melemah atau otorisasi keuangan dilakukan secara teledor tanpa validasi berlapis, maka peluang fraud terbuka lebar. Sebaliknya, jika 5 komponen COSO dijalankan secara

konsisten—terutama penegakan budaya integritas dan pemisahan fungsi akuntansi secara tegas—maka sistem secara otomatis mendeteksi anomali sejak awal, sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Secara simultan, pembuktian pengaruh bersama antara audit kinerja dan pengendalian internal ( $R\text{ Square} = 67,2\%$ ) menunjukkan pentingnya membangun arsitektur pengawasan yang terintegrasi (integrated anti-fraud architecture). Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai garis pertahanan pertama (first line of defense) yang bersifat harian dan melekat langsung pada sistem operasional instansi, sedangkan Audit Kinerja berperan sebagai garis pertahanan kedua (second line of defense) yang mengevaluasi, memvalidasi, serta menyempurnakan efektivitas lini pertahanan tersebut secara berkala. Lemahnya salah satu variabel akan menurunkan efektivitas variabel lainnya. Sinergi kedua variabel ini terbukti mampu mengeliminasi celah kolusi (collusion) birokrasi dan meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama: (1) Audit Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Peningkatan kualitas audit kinerja berimplikasi nyata pada penguatan fungsi deteksi dan penutupan celah inefisiensi anggaran. (2) Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Variabel ini memiliki pengaruh parsial paling dominan, menegaskan bahwa sistem pengendalian yang andal efektif melumpuhkan elemen kesempatan kecurangan dalam birokrasi. (3) Secara simultan, Audit Kinerja dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dengan kontribusi penjelasan model sebesar 67,2%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model riset.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran akademis dan praktis sebagai berikut: (1) Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, diharapkan untuk terus mengintensifkan kompetensi teknis para auditor dan PPUPD melalui pelatihan berkelanjutan di bidang fraud auditing, audit forensik, serta pemanfaatan teknologi informasi pengawasan berbasis digital. (2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, disarankan untuk memperketat pengawasan harian pada instansi-instansi yang mengelola anggaran besar serta memperbaiki tata kelola Whistleblowing System agar pegawai berani melaporkan indikasi kecurangan dengan jaminan perlindungan identitas yang aman. (3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan sampel penelitian ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menambahkan variabel independen baru seperti komitmen organisasi, moralitas individu, serta keandalan audit investigatif guna meningkatkan daya prediksi model.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Chindyanita, D. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 45–56.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control – Integrated Framework*. New York: COSO.
- Fahmi, I., & Syahputra, R. (2019). Peranan audit internal dalam pencegahan *fraud*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 12–20.
- Fitri, A. (2023). Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada inspektorat. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(1), 33–45.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, S. (2020). Pengaruh audit kinerja terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 101–110.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lestari, N., & Nugroho, A. (2021). Pengaruh audit kinerja dan sistem pengendalian internal terhadap efisiensi organisasi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 22–34.
- Mahendra, I., Putra, D., & Sari, N. (2021). Pengaruh audit internal dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 12(2), 77–88.
- Pusdiklatwas BPKP. (2016). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPKP.

- Rosna. (2025). Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Akuntansi Modern*, 15(1), 55–67.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of *fraud*: The S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wibowo, A. (2023). Pencegahan *fraud* melalui audit internal dan pengendalian internal. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 11(2), 60–72.
- Wulandari, R., & Nuryatno, M. (2018). Pengaruh pengendalian internal, integritas, dan profesionalisme terhadap pencegahan *fraud*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 89–98.
- Yuniarti, R. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan kesadaran anti *fraud* terhadap pencegahan penipuan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 234–245.